



Guru SMPN 3 Sawan Pakrimik Pungli

Soal Iuran Triwulan Sebesar Rp 100 Ribu

SINGARAJA - Guru di SMPN 3 Sawan, yang ada di Desa Suwug, Kecamatan Sawan *pakrimik*. Mereka keberatan dengan adanya kebijakan iuran triwulan sebesar Rp 100 ribu, untuk jasa operator sekolah yang melakukan input data sertifikasi guru ke dalam sistem. Keberatan muncul karena muncul nada ancaman jika guru tak ikut iuran.

Konon iuran itu sudah berlangsung sejak lama. Dulunya iuran yang dipungut sebesar

Rp 50 ribu per tiga bulan. Kini iuran naik menjadi Rp 100 ribu per tiga bulan. Konon iuran itu diberikan kepada petugas yang melakukan input data sertifikasi guru ke dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Guru pun merasa keberatan menjalankan iuran itu, karena iuran disertai dengan kata-kata yang bernada ancaman. "Katanya itu untuk jasa input data sertifikasi. Katanya kalau kami tidak mau iuran, input data sertifikasi kami dipersulit," ujar salah seorang guru yang minta namanya tak dikorbankan.

Guru itu pun sebenarnya mengaku tak keberatan dengan

iuran itu. Hanya saja ia keberatan dengan hal-hal yang bernada ancaman. "Bagi kami itu ancaman. Kalau sampai lewat batas waktu atau data jam mengajar kami salah, sertifikasinya terhambat," keluhnya.

Kepala SMPN 3 Sawan, Nyoman Gelgel Subakat tak menampik adanya pungutan Rp 100 ribu per tiga bulan di kalangan guru. Namun ia tak sepakat jika hal itu disebut pungutan atau iuran. Melainkan sumbangan sukarela yang diberikan kepada operator sekolah, yang sudah membantu melakukan input data dalam sistem Dapodik.

"Mana mungkin saya yang memotong. Uangnya *kan* masuk ke rekening masing-masing guru. Adanya sukarela, itu juga dihimpun oleh kalangan guru itu sendiri," katanya. Gelgel memandang sumbangan itu sebagai bentuk apresiasi para guru kepada operator sekolah yang membantu memasukkan data dalam sistem Dapodik.

Sementara itu Kepala Disdikpora Buleleng Gede Suyasa mengaku sudah menerima laporan mengenai hal itu. Suyasa menyatakan telah menugaskan pengawas sekolah guna menelusuri masalah itu. Namun hingga siang kemarin,

Suyasa belum menerima laporan tertulis soal itu.

Menurut Suyasa, idealnya para guru memang mengurus sendiri dokumen sertifikasi mereka. "Seharusnya memang guru itu sendiri yang menginput data ke Dapodik, karena itu untuk sertifikasi mereka *kok*. Tapi kadang *kan* ada guru yang tidak mau repot, ada yang tidak paham bagaimana memasukkan data, sehingga minta bantuan sama operator. Nah ini kami masih menunggu laporan lengkap dari pengawas juga. Setelah ada laporan saya berikan penjelasan lebih rinci," tandas Suyasa. (eps/gup)

Edisi : Rabu, 31 Mei 2017

Hal : 25